

**“ANALISIS KAUSALITAS KETIMPANGAN PENDAPATAN, KORUPSI
DAN KEMISKINAN DI NEGARABERPENDAPATAN MENENGAH
KEBAWAHA ASEAN”**

SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang***



Oleh:

NOVILIA HARTISA

16060099/2016

**ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS KAUSALITAS KETIMPANGAN PENDAPATAN, KORUPSI
DAN KEMISKINAN DI NEGARA BERPENDAPATAN MENENGAH
KEBAWAHA ASEAN**

Nama : Novilia Hartisa
NIM/TM : 16060099/2016
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2021

Disetujui Oleh :
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Melti Roza Adry, SE, ME
NIP. 19830505 200604 2 001

Diketahui Oleh:
Pembimbing



Dewi Zaini Putri, SE, MM
NIP. 19850804 2008 12 2 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**ANALISIS KAUSALITAS KETIMPANGAN PENDAPATAN,
KORUPSI DAN KEMISKINAN DI NEGARA BERPENDAPATAN
MENENGAH KEBAWAH ASEAN**

Nama : Novilia Hartisa
NIM/TM : 16060099/2016
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2021

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Dewi Zaini Putri, SE, MM	1. 
2	Anggota	: Ariusni, SE, M.Si	2. 
3	Anggota	: Muhammad Irfan, S.E, M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Novilia Hartisa
Nim/Th. Masuk : 2016/16060099
Tempat / Tanggal Lahir : Padang/28 November 1998
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Lubuk Gading permai IV Blok B No 31
No. Hp/Telephone : 082169775672
Judul Skripsi : Analisis Kausalitas Ketimpangan Pendapatan, Korupsi dan Kemiskinan di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah ASEAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis / skripsi Ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis / skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing
3. Pada karya tulis / skripsi ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan daftar pustaka.
4. Karya tulis / skripsi ini ~~Sah~~ apabila telah ditanda tangani ~~asli~~ oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Mei 2020



Novilia Hartisa
NIM : 16060099/2016

ABSTRAK

Novilia Hartisa (16060099) : Analisis Ketimpangan Pendapatan, Korupsi dan Kemiskinan di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN. Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, dengan dosen pembimbing Ibu Dewi Zaini Putri, SE, MM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Hubungan kausalitas antara ketimpangan pendapatan dan korupsi di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN(2) Hubungan kausalitas antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN(3) Hubungan kausalitas antara korupsi dan kemiskinan di Negara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN. Penelitian ini berjenis Deskriptif dan Asosiatif. Data yang digunakan data sekunder yang berupa data panel dilima Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEANdari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018.

Teknik pengumpulan data ini menggunakan dokumentasi dan studi kepustakaan yang diperoleh dari lembaga dan juga instansi yang terkait. Pada analisis induktif dengan pendekatan PVAR, melakukan beberapa uji yaitu: (1) Uji Stasioner (2) Uji Kointegrasi (3) Penentuan Lag Optimum (4) Uji Kausalits Granger (5) Uji Stabilitas (6) Impluse Respon Function (7) Variance Decomposit.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa: (1) Terdapat hubungan kausalitas antara ketimpangan pendapatan dan korupsi di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN(2) Terdapat hubungan kausalitas satu arah antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN(3) Tidak terdapat hubungan kausalitas antara korupsi dan kemiskinan di Negara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka untuk kedepannya disarankan Perlunya peran dan kebijakan dari masing-masingNegara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEANdalam menyikapi kondisi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dan juga korupsi dengan cara lebih meningkatkan sembilan sektor perekonomian di Negara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN.

Kata Kunci : Ketimpangan Pendapatan, Korupsi, Kemiskinan, PVAR.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II.....	12
KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS	12
A. Kajian Teori	12
1. Teori Ketimpangan pendapatan	12
2. Teori Kriminalitas	18
3. Teori Kemiskinan.....	23
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Konseptual	30
D. Hipotesis Penelitian.....	32
BAB III	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian	34
C. Jenis Data	35
1. Berdasarkan cara memperolehnya	35
2. Berdasarkan waktu pengumpulan	35
D. Berdasarkan Sifatnya	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Defenisi Operasional	36
1. Ketimpangan Pendapatan.....	36
2. Korupsi.....	36
3. Kemiskinan	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
1) Analisis Deskriptif	37
2) Analisis Induktif	37

3) Model Empiris Analisis Vector Autoregression (VAR)	38
4) Langkah-langkah Analisis Vector Auto Reggression (VAR).....	40
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	47
1. Keadaan Geografis Asia Tenggara	47
2. Keadaan Penduduk Negara-negara Asia Tenggara.....	48
3. Gambaran Kondisi Perekonomian di Asia Tenggara.....	49
B. Hasil Penelitian	45
1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	45
a. Deskriptif perkembangan ketimpangan pendapatan pada negara berpendapatan menengah kebawah ASEAN.....	45
b. Deskriptif perkembangan korupsi pada negara berpendapatan menengah kebawah ASEAN	47
c. Deskriptif perkembangan kemiskinan pada negara berpendapatan menengah kebawah ASEAN	51
2. Analisis Induktif.....	54
a. Uji Akar Unit (Unit Root Test).....	55
b. Uji Kointegrasi (<i>Panel Cointegration Test</i>).....	56
c. Lag Optimum	57
d. Hasil Uji Kausalitas Granger	58
e. Hasil Estimasi Model Panel Vector Autoregression (PVAR) Ketimpangan Pendapatan, Korupsi dan Kemiskinan	60
f. Hasil Uji Stabilitas	63
3. Hasil Implementasi Model VAR.....	64
a. Uji Respon Variabel (Impluse Respon Function)	64
b. Uji Kontribusi (Variance Decomposition).....	67
4. Pengujian Hipotesis	70
C. Pembahasan	72
1. Hubungan kausalitas antara ketimpangan pendapatan dan korupsi negara berpendapatan menengah kebawah ASEAN	72
2. Hubungan kausalitas antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di negara berpendapatan menengah kebawah ASEAN	76
3. Hubungan kausalitas antara korupsi dan kemiskinan di negara berpendapatan menengah kebawah ASEAN.....	79
BAB V	82
SIMPULAN DAN SARAN	82
A. Simpulan	82

B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

1.1	PersentaseKetimpanganPendapatan (%) di negara berpendapatan menengah kebawah di ASEAN pada tahun 2010-2018	5
1.2	Skor IndeksPersepsiKorupsi (IPK) di negara berpendapatan menengah kebawah di ASEAN pada tahun 2010-2018	7
1.3	PersentasePenduduk yang Hidup di bawah Garis Kemiskinan di negara berpendapatan menengah kebawah di ASEAN pada tahun 2010-2018....	10
4.1	Data Luas Daerah, Jumlah Penduduk di negara berpendapatan menengah kebawah di ASEAN tahun 2016.....	43
4.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di negara berpendapatan menengah kebawah di ASEAN tahun 2010-2018.....	44
4.3	Data Persentase Ketimpangan Pendapatan di negara berpendapatan menengah kebawah di ASEAN tahun 2010-2018.....	46
4.4	Data Persentase Indeks Persepsi Korupsi di negara berpendapatan menengah kebawah di ASEAN tahun 2010-2018.....	49
4.5	Persentase Penduduk yang Hidup di bawah Garis Kemiskinan di negara berpendapatan menengah kebawah di ASEAN 2010-2018.....	52
4.6	Hasil Uji Akaike Root menggunakan metode Levin, Lin dan Chu	54
4.7	Uji Kointegrasi Variabel Ketimpangan Pendapatan, Korupsi dan Kemiskinan di negara berpendapatan menengah kebawah	55
4.8	Uji Lag Optimum	56
4.9	Uji Kausalitas Granger	58
4.10	Estimasi PVAR Ketimpangan Pendapatan, Korupsi dan Kemiskinan	60
4.11	Hasil Analisis Variance Decomposition Ketimpangan Pendapatan, Korupsi dan Kemiskinan.....	67

DAFTAR GAMBAR

2.1	Kurva Lorenz	15
2.2	Koefisien Gini.....	16
2.3	LingkaranSetanKemiskinan.....	21
2.4	KerangkaKonseptual.....	25
4.1	Hasil Uji Stabilitas Vector Auto Reggression (VAR)	63
4.2	Impluse Response Function (IRF) antara Ketimpangan Pendapatan, Korupsi dan Kemiskinan didi negara berpendapatan menengah kebawah di ASEAN	65

BAB I

PENDAHULUAN

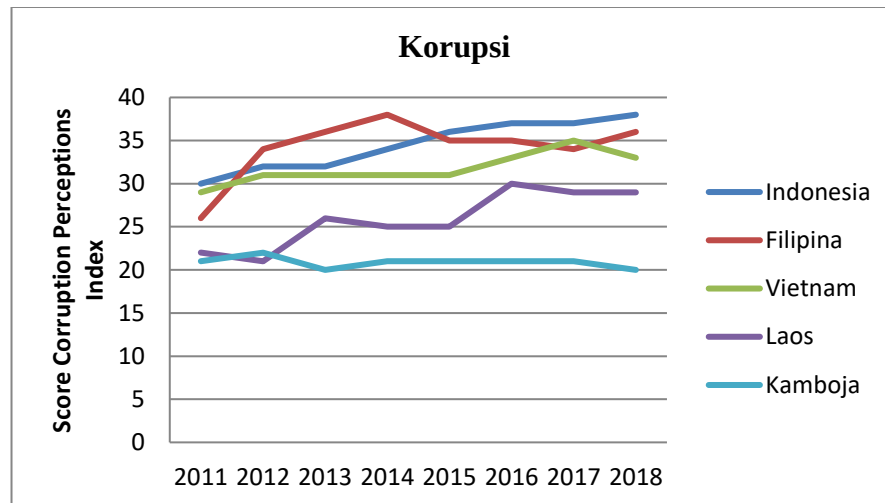
A. Latar Belakang

Negara berkembang cenderung memiliki masalah dalam mencapai pembangunan ekonominya. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang baik dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya. Namun untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya banyak masalah yang sering di temui oleh Negara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN. Masalah yang dihadapi oleh Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN salah satunya seperti korupsi (Global Connections, 2018).

Korupsi menjadi masalah yang sering dijumpai di negara-negara berkembang karena merupakan musuh yang menghantui setiap negara, dikarenakan telah menjadi masalah global yang mengakibatkan kerugian terhadap berbagai bidang. Korupsi bukan hanya terjadi pada lembaga eksekutif, yang sekelilingnya memiliki kesempatan sebagai pemilik hak mengelola anggaran negara. Bahkan legislatif dan yudikatif yang memiliki peran untuk mengawasi dan mengadili eksekutif juga ikut terjerumus dalam korupsi itu sendiri. Menurut laporan *Business Anti Corruption* praktek korupsi dan suap kerap terjadi di sistem judicial yang melibatkan aparat keamanan. Bahkan perilaku korupsi hampir di semua sektor baik pelayanan publik, administrasi pajak, tanah cukai dan pengadaan barang dan jasa.

Dikutip dari berita kumparan.com tanggal 19 September 2018 menyatakan buruknya persepsi korupsi di negara-negara ASEAN yang mana kondisi paling

buruk terjadi di negara Kamboja. Besarnya praktek persepsi korupsi di Asean menyebabkan institusi pemerintah dan pasar sangat rentan terutama di negara seperti Vietnam, Kamboja, Laos dan Filipina. Berikut grafik Indeks Persepsi Korupsi di Negara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN:



Gambar 1.1 Grafik Skor Indeks Persepsi Korupsi di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN

Pada grafik 1.1 menunjukkan perkembangan korupsi di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN tahun 2011-2018. Skor indeks persepsi korupsi bersumber dari *Transparency International*, dihitung dalam bentuk skor dari 0-100, dimana 100 menunjukkan bebas korupsi sedangkan mendekati 0 menunjukan tingginya jumlah korupsi disuatu negara yang disurvei. Dapat dilihat skor rata-rata indeks persepsi korupsi di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN tergolong tinggi karena menunjukan angka di bawah 50 poin. Dapat disimpulkan bahwa di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN masih banyaknya praktek korupsi yang terjadi.

Indonesia menjadi negara yang memiliki skor rata-rata Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tertinggi sebesar 34,5 dimana, Indonesia memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN yang lainnya hal tersebut dibuktikan banyaknya operasi tangkap tangan koruptor, Indonesia ternyata menjadi negara terbaik ketiga dalam pemberantasan korupsi di Asia Tenggara bahkan sekarang ini indeks korupsi di Indonesia dar nilai 17 yang artinya masih banyaknya terjadi korupsi di Indonesia dan sekarang sudah mampu mencapai nilai skor IPK 37 yang berarti suatu kemajuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia karena dalam waktu kurang dari 20 tahun tercatat, melonjak sebanyak 20 poin, hal tersebut juga terlihat pada tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia yang cukup rendah. Menurut Blackburn *et al* (2006), korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan memainkan peranan penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan. Namun, beberapa menganggap bahwa korupsi digunakan sebagai pelumas untuk birokrasi, yang artinya korupsi dapat bermanfaat bagi perekonomian (Huntington, 1968 ; Lui, 1985).

Beda halnya dengan Kamboja yang memiliki skor rata-rata Indeks Persepsi Korupsi terendah yaitu 20,87. Ini berarti negara tersebut negara yang paling korupsi atau banyaknya terjadi korupsi di negara Kamboja karena mendekati nilai 0. Hal ini disebabkan karena lemahnya pemberantasan korupsi dan tidak adanya kemauan politik dari pemerintah negara Kamboja tersebut. Menurut *Transparency International* Kamboja merupakan salah satu negara

dengan peringkat korupsi tertinggi di dunia. Sementara kemiskinan dan ketimpangan di Kamboja tergolong rendah. Menurut Tika Widiastuti (2008) faktor penyebab korupsi tidak selalu dari kemiskinan melainkan ada faktor lain yaitu pertumbuhan ekonomi ketika tingginya pertumbuhan ekonomi di Kamboja maka akan menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan di negara tersebut rendah.

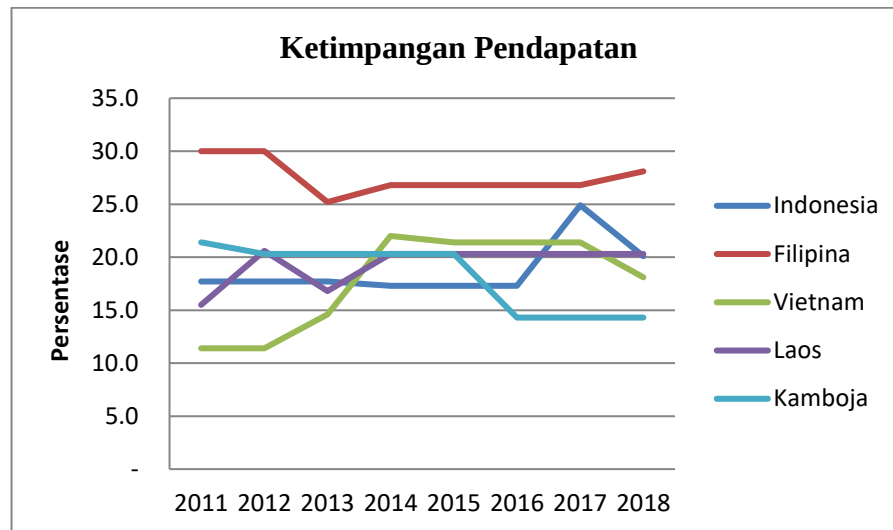
Tindakan korupsi dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunkan investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Korupsi juga dipandang sebagai kegagalan mekanisme pasar, yang ditandai adanya peluang bagi pelaku pasar untuk mendapatkan profit yang setinggi-tingginya dengan cara melanggar hukum dan memanfaatkan celah peraturan yang ada. Korupsi juga sebagai salah satu faktor terjadinya ketimpangan pendapatan. Studi yang dilakukan oleh Gupta, Devodi dan Alonso bahwa korupsi mengakibatkan semakin lebarnya ketimpangan pendapatan.

United Nation Development Program (2013) dalam sepuluh tahun terakhir menyatakan ketimpangan pendapatan di hampir semua negara di dunia yang memisahkan orang kaya dan orang miskin semakin melebar. Negara-negara di ASEAN ini satu-satunya wilayah di Asia Pasifik dengan kesenjangan yang semakin lebar dan masih belum berhasil mengurangi kesenjangan pendapatan. Di Indonesia, sekitar 50% dari kekayaan negara berada di tangan 1% orang terkaya. Di Vietnam, 210 warga negara super kaya mendapat lebih dari cukup dalam

setahun untuk membangkitkan 3,2 juta orang keluar dari kemiskinan. Sedangkan di Filipina, pendapatan keluarga 10% terkaya, rata-rata diperkirakan mencapai US\$ 14.708 Pada 2015. Pendapatan ini sembilan kali lebih tinggi dari 10% penduduk termiskin yang hanya mencapai US\$ 1.609. Ketimpangan pendapatan juga dapat mempengaruhi tingkat korupsi dan juga kemiskinan karena dapat membuat jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dimana orang kaya memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat korupsi sedangkan orang miskin lebih rentan terhadap pemerasan dan tidak mampu untuk meminta pertanggungjawaban orang kaya yang membuat orang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Menurut Rised Dana Moneter Internasional (2016), secara umum ketimpangan di negara-negara maju maupun berkembang meningkat. Karena itulah, ketimpangan pendapatan yang semakin melebar menjadi tantangan sejak dulu hingga sekarang bagi dunia internasional.

Pada Gambar 1.2 akan disajikan grafik ketimpangan pendapatan di lima negara ASEAN yang tergolong pendapatan kelas menengah kebawah dari tahun 2011-2018. Pada tahun 2011 rata-rata ketimpangan pendapatan di negara ASEAN yang tergolong kelas menengah kebawah sebesar 19,2% sedangkan tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 20,0% dan pada tahun 2013 menurun menjadi 18,92%. kemudian pada tahun 2014 kembali meningkat sebesar 21,34% dan pada tahun 2015-2016 kembali menurun sebesar 21,22% dan 20,02% kemudian kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 21,54% dan

menurunkembali pada tahun 2018 sebesar 20,18%. Berikut grafik ketimpangan pendapatan di Negara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN:



Gambar 1.2 Grafik Ketimpangan Pendapatan di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN

Filipina memiliki rata-rata ketimpanganpendapatantertinggiyaitusebesar 27,56% dari Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEANyang lainnya. Ketimpanganpendapatan yang menonjolantarasi kaya dan si miskin di Filipina dikarenakansepertiga penduduk Filipina hidup dibawah garis kemiskinan dan sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok. *Asian Development Bank* mengatakan dikawasan Amerika Latin pertumbuhan ekonomi dapat membantu pemerataan pendapatan dan peluang kerja namun yang terjadi di Asia khususnya Filipina malah sebaliknya, pertumbuhan pesat perekonomian Asia menjadi boomerang yang mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin terbukti dengan beberapa pengusaha Filipina masuk dalam daftar orang terkaya versi majalah *Forbes*(2018). Selain itu, ADB mengatakan dua faktor utama yang menyebabkan ketimpangan pendapatan di

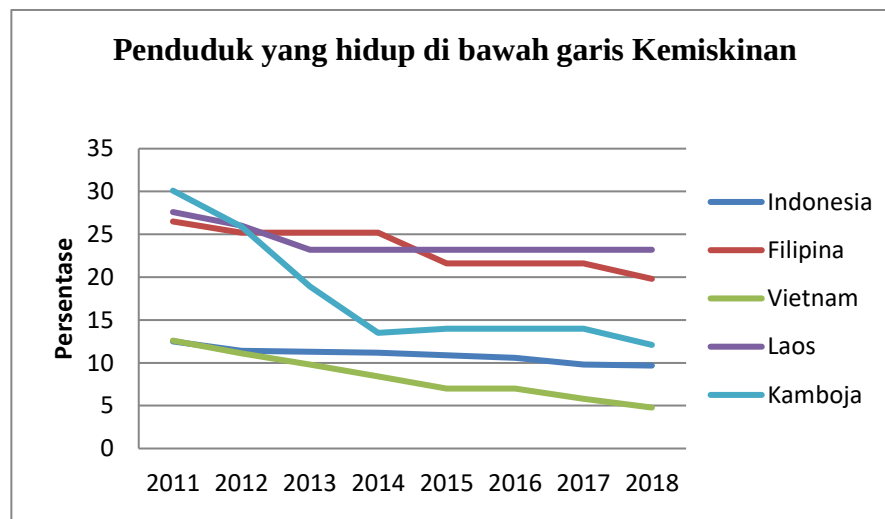
Filipina adalah kurangnya pemerataan dan kesempatan kerja. Menurut Joko Waluyo (2010) menyatakan tingginya ketimpangan dan juga kemiskinan membuat sedikitnya pelaku korupsi di Filipina hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja sulit karena sebagian besar korupsi di dominasi oleh orang-orang kaya.

Sedangkan rata-rata ketimpangan pendapatan yang paling terendah dari Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN yang lainnya terjadi di negara Vietnam yaitu sebesar 17,71%. Hal ini dapat dilihat dengan ekonomi Vietnam tumbuh sebesar 8,4% per tahun sehingga Vietnam berhasil mengurangi kemiskinan dan juga ketimpangan sementara, Vietnam menjadi negara ketiga dengan tingginya tingkat korupsi dari Negara Asia Tenggara yang lainnya yang artinya sedikit terjadi korupsi di Vietnam hal ini dipicu oleh kebijakan publik yang menjual pengaruh untuk meraih dukungan (tirto.id).

Selain ketimpangan pendapatan ada faktor lain dari penyebab korupsi yaitu kemiskinan. Tingginya tingkat korupsi dapat memperburuk kondisi hidup orang miskin dan mendistorsi seluruh proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan program-program sektor publik. Korupsi juga dapat menjadi penghalang dalam pengetasan kemiskinan dan juga dapat menghancurkan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi kemiskinan (Negin, dkk 2010).

Di kutip dari berita liputan6 pada 7 April 2016 menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah berjalan sejak akhir 2015

menjelaskan masih banyak pelaku usaha mikro yang belum siap untuk bersaing dengan negara-negara di ASEAN, dengan ketidaksiapan itu dapat meningkatkan angka kemiskinan dan juga dapat memicu pelebaran kesenjangan antara kaya dan miskin (liputan6.com). Berikut merupakan data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN:



Gambar 1.3 Grafik Persentase Penduduk yang hidup di bawah garis Kemiskinan di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN

Pada grafik 1.3 menunjukkan total persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di negara berpendapatan menengah Kebawah di ASEAN pada tahun 2013-2018. Dimana persentase rata-rata kemiskinan di negara berpendapatan kelas menengah berkisar di bawah 50% yang berarti masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Negara Berpendapatan Menengah Rendah Asia Tenggara.

Laos menjadi negara yang memiliki persentase rata-rata kemiskinan tertinggi dari lima negara berpendapatan menengah ke bawah di ASEAN yaitu sebesar 24,1% yang berarti banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di negara Laos. Hal tersebut dibuktikan dengan Negara-negara sekelilingnya, perekonomian Laos memang tertinggal karena, pertumbuhan ekonomi Laos terhambat oleh minimnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang sangat kurang di negara berpenduduk sekitar 6 juta itu dan juga pendapatan per kapitanya tercatat 986 dollar AS per tahun sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah yang mengakibatkan semakin tingginya kemiskinan yang mengakibatkan korupsi di Laos juga tinggi karena untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan melalui cara terlibat korupsi. Sementara Ketimpangan di Laos juga termasuk tinggi, berdasarkan Bank Dunia tahun 2005 sebanyak 37% penduduk Laos mengenyam pendidikan tinggi di luar negeri guna mendapatkan pekerjaan dengan standar gaji yang tinggi.

Sedangkan Vietnam menjadi negara yang memiliki persentase rata-rata kemiskinan terendah yaitu sebesar 8,43% yang berarti sedikit penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di negara Vietnam. Menurut *PricewaterhouseCoopers* pada bulan Februari 2017, Vietnam mungkin menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dan ekonomi Vietnam bergantung sebagian besar pada investasi langsung asing untuk menarik modal dari luar negeri. Sementara Vietnam menjadi negara ketiga dengan tingkat korupsi terendah dari negara berpendapatan menengah ke bawah di

ASEAN lainnya hal ini karena dengan keadaan ekonomi yang baik sehingga mendefinisikan negara Vietnam sangat kecil kemungkinan untuk terlibat korupsi hal ini dibuktikan dengan data IPK negara Vietnam karena pertumbuhan ekonominya disumbang dari investasi langsung asing dan untuk pendapatannya negara Vietnam harus berusaha untuk berinvestasi sehingga untuk terlibat korupsi di negaranya sangat kecil.

Menurut Rahayu dan Widodo (2012), dalam penelitiannya menyatakan kemiskinan tidak mempengaruhi korupsi, sementara korupsi lah yang mempengaruhi kemiskinan. Dalam penelitian ini terdapat hubungan kausalitas satu arah antara korupsi dengan kemiskinan. Sedangkan menurut Negin, dkk (2010), dalam penelitiannya bertolak belakang dengan penelitian Rahayu dan Widodo (2012). Disini menunjukkan bahwa kemiskinan mempengaruhi korupsi dan korupsi juga mempengaruhi kemiskinan. Dan terdapat hubungan kausalitas dua arah antara korupsi dan kemiskinan dan kemiskinan dengan korupsi.

Berdasarkan data dan fenomena menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian secara statistik apakah variabel tersebut memiliki hubungan timbal balik. Dengan tidak mengabaikan variabel lain maka perlu dibuktikan dengan suatu penelitian ilmiah dengan judul **“Analisis Kausalitas Ketimpangan Pendapatan, Korupsi dan Kemiskinan di Negara Berpendapatan Bawah di ASEAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara ketimpangan pendapatan dan korupsi di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN?
2. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN?
3. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara korupsi dan kemiskinan di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Hubungan kausalitas antara ketimpangan pendapatan dan korupsi di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN.
2. Hubungan kausalitas antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN.
3. Hubungan kausalitas antara korupsi dan kemiskinan di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat dari penelitian ini :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang penelitian ilmiah

2. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bagi peneliti lain, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam meneliti dan juga penulis berharap tulisan ini dapat berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1) Ketimpangan pendapatan

Ketimpangan pendapatan membedakan orang kaya dengan orang yang lainnya dimana orang kaya memiliki uang yang lebih banyak, sehingga terjadi jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin karena si kaya hidup enak sedangkan yang miskin berjuang untuk hidup dan bagi kelas menengah yang bercita-cita tinggi hidup penuh dengan kekhawatiran (Mankiw, 2006). Sebab utama ketimpangan pendapatan adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara berkembang. Dampak balik dan dampak sebar tidak mungkin berjalan seimbang hal ini disebabkan pertama, ketimpangan pendapatan jauh lebih besar di negara miskin ketimbang di negara

kaya dan kedua, di negara miskin ketimpangan pendapatan semakin melebar sedang di negara kaya makin menyempit (Jhingan, 2016). Distribusi yang tidak proposional atau seimbang dari pendapatan nasional total di antara berbagai rumah tangga dalam suatu negara dapat diartikan sebagai ketimpangan pendapatan (Todaro dan Smith, 2011).

Menurut Todaro (2011) menyatakan ketimpangan pendapatan yang ekstrim menimbulkan beberapa hal pertama, inefisiensi perekonomian. Hal ini disebabkan karena pada tingkat pendapatan rata-rata manapun, semakin tinggi ketimpangan semakin sedikit pula jumlah penduduk yang memenuhi syarat untuk mendapat pinjaman atau bentuk kredit lainnya. Kedua, dengan adanya disparitas pendapatan yang ekstrim akan merusak stabilitas dan solidaritas sosial. Selain itu, tingginya ketimpangan akan memperkuat kekuasaan politik orang-orang kaya yang berarti juga menguatkan daya tawar ekonominya. Ketimpangan yang tinggi juga memudahkan terjadinya perburuan rente (*rent seeking*) seperti lobi berlebihan, sumbangan yang besar untuk kegiatan politik, penyuapan dan kronisme. Ketiga, ketimpangan yang ekstrim umumnya dipandang tidak adil, karena kebanyakan ketimpangan yang terjadi di dunia disebabkan oleh keberuntungan atau faktor-faktor yang berada di luar kehendak seseorang.

Adapun penyebab ketimpangan pendapatan di negara sedang berkembang menurut Irma Adelman dan Cynthia Thaf Morris dalam *Economic growth and Social Equity in Developing Countries* yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menurunkan pendapatan perkapita, ketidakmerataan pembangunan antar

wilayah, rendahnya mobilitas sosial, inflasi yang mana ketika pendapatan bertambah tetapi tidak diikuti dengan pertambahan produksi barang-barang, Investasi yang banyak dalam proyek padat modal, dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan industri substitusi impor sehingga mengakibatkan harga barang hasil industri adalah usah untuk usaha golongan kapitalis.

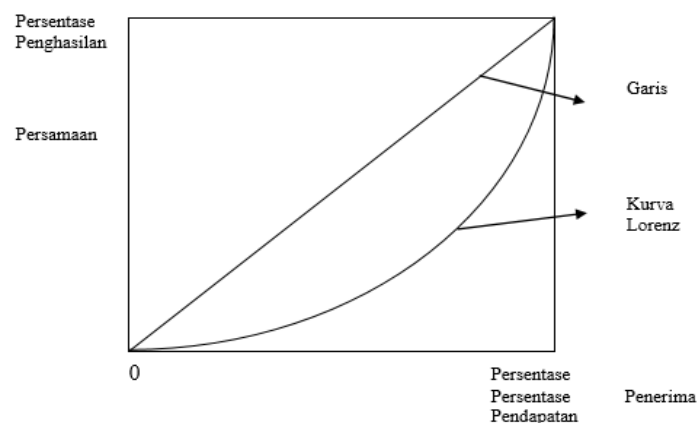
Le (2008), menyatakan ketimpangan yang rendah mengarah ke kemiskinan yang rendah. Pengurangan kemiskinan juga dapat mengurangi ketimpangan di suatu negara. Kemiskinan dan ketimpangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti PDB per kapita, rasio investasi terhadap PDB, keterbukaan perdagangan dan ukuran modal manusia seperti rata-rata tahun sekolah. Sulemana (2018), menyatakan dalam studi lintas negara dari 129 negara. Ketimpangan pendapatan memiliki dampak yang besar pada korupsi dalam rezim yang lebih demokratis. Peningkatan standar deviasi dalam korupsi menghasilkan sebelas poin peningkatan ketimpangan pendapatan dan 5% pertumbuhan dalam pendapatan orang miskin. Selanjutnya, korupsi lebih banyak menguntungkan orang kaya daripada orang miskin sehingga memperbesar ketimpangan pendapatan dan membuat orang miskin semakin miskin.

a. Indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan

1) Kurva Lorenz

Kurva Lorenz merupakan suatu kurva yang menggambarkan perbedaan distribusi ukuran pendapatan dari pemerataan sempurna, yang

menunjukkan hubungan kuantitatif *faktual* antara persentase penerima pendapatan dan persentase pendapatan total yang sebenarnya mereka peroleh misalnya selama satu tahun. Pada gambar 2.1 dapat kita lihat bahwa jumlah penerima pendapatan ditempatkan pada sumbu horizontal dalam bentuk persentase kumulatif, sedangkan pada sumbu vertikal terlihat bagian pendapatan total yang diterima oleh setiap persentase jumlah penduduk. Bagian pendapatan ini diakumulasi sampai dengan 100 persen, yang berarti bahwa kurva kedua sumbu itu sama panjang.



Gambar 2.1 Kurva Lorenz
Sumber : Todaro dan Smith (2011)

Kurva Lorenz menggambarkan semakin jauh garis Lorenz melengkung dari garis diagonal (garis pemerataan sempurna), semakin besar tingkat ketimpangan yang terjadi dan begitu pun sebaliknya semakin mendekati garis Lorenz ke garis diagonal maka semakin kecil tingkat ketimpangan yang terjadi atau banyak orang yang makin kecil menikmati pendapatan.

2) Koefisien Gini

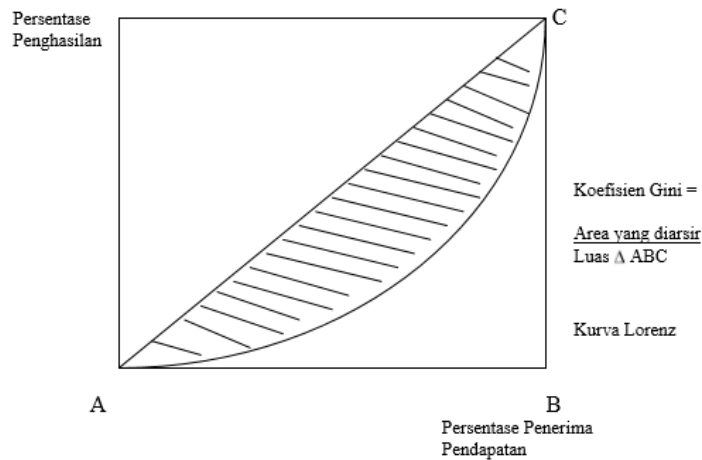
Metode perhitungan Koefisien Gini yang diperkenalkan oleh Corrado Gini tahun 1909 melalui bukunya yang berjudul “*Concentration and dependency ratios*”.

$$G(\text{Gini Index}) = \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |X_i - X_j|}{2 \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N X_j}$$

Dimana : N = jumlah golongan pendapatan, misal N=3 maka populasi penduduk dibagi menjadi 3 golongan, yaitu berpendapatan tinggi, menengah dan rendah, x = share pendapatan nasional dari masing-masing kelompok, misal x1 = 50% artinya kelompok berpendapatan tinggi menyumbang 50% dari pendapatan nasional.

Koefisien ini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan sebuah negara diperoleh dengan menghitung rasio dari bidang yang berada di antarabidang diagonal dan kurva Lorenz kemudian dibagi dengan total

bidang setengah bujur sangkar tempat kurva itu terletak. Rasio ini dikenal dengan nama rasio konsentrasi Gini (*Gini Concentration Ratio*) atau Koefisien Gini (*Gini Coefficient*)



Gambar 2.2 Koefisien Gini
Sumber : Todaro dan Smith (2011)

Koefisiengini adalah ukuran ketimpangan agregat yang berkisar dari 0 (kemeraataan sempurna) sampai dengan 1 (ketimpangan sempurna). Koefisiengini bagi negara-negara yang distribusipendapatnnya sangat timpang berada pada 0,50 dan 0,70, sedangkan bagi negara-negara yang distribusipendapatannya merata memiliki koefisiengini antara 0,20 dan 0,35. Semakin tinggi nilai koefisien, semakin tinggi tingkat ketimpangandistribusipendapatan, sebaliknya semakin rendah nilai koefisiengini, semakin merata pula ketimpangandistribusipendapatan.

3) Indeks Atkinson

Indeks Atkinson merupakan ukuran kesenjangan yang dikembangkan oleh ekonom Inggris, Anthony Barnes Atkinson. Ukuran ini mampu menangkap perubahan pada segmen-segmen yang berbeda dari distribusi

pendapatan. Perhitungan indeks Atkinson dimulai dengan konsep EDE (Equally Distributed Equivalent). EDE merupakan level pendapatan dimana jika pendapatan tersebut dihasilkan oleh setiap individu dalam distribusi pendapatan, maka semua individu tersebut dimungkinkan untuk mencapai level kesejahteraan yang sama.

Indeks Atkinson dihitung dengan menggunakan parameter kesenjangan yang dilambangkan dengan ϵ yang bervariasi dari $\epsilon=0,5$, $\epsilon=1$, $\epsilon=2$, dan $\epsilon=3$ dengan tujuan guna mendapatkan gambaran kebijakan mana yang paling tepat untuk meminimalisir dampak kesenjangan regional terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dapat dilakukan secara implisit ditunjukkan dengan ϵ adalah peningkatan pendapatan masyarakat bagi yang berada di urutan terbawah dari distribusi mekanisme transfer pendapatan. Nilai indeks Atkinson ini berkisar antara nol sampai dengan satu, dimana apabila satu mengindikasikan kesenjangan yang sangat tinggi sebesar 100 persen.

2. Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan atau menyogok. Menurut *Transparency International* (2018) adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak illegal memperoleh atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. *World bank* (1997)

mengatakan korupsi adalah setiap transaksi yang dilakukan antar pelaku sektor swasta dan sektor publik secara illegal dan ditransformasikan menjadi keuntungan pribadi (Subekti, 2013).

Philip (1997), menjelaskan beberapa definisi korupsi. Pertama, korupsi berpusat pada kantor publik (*public office centered corruption*) yang artinya tindakan atau tingkah laku pejabat publik yang menyimpang dari tugasnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok orang tertentu. Kedua, korupsi yang berpusat pada dampak korupsi terhadap kepentingan umum (*public interest centered*) yaitu korupsi terjadi jika seseorang pemegang kekuasaan pada kedudukan publik melakukan tindakan kepada orang yang memberi imbalan sehingga dapat merusak kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan. Ketiga, Korupsi berpusat pada pasar (*market centered*) berdasarkan pada analisis tentang korupsi yang menggunakan teori pilihan publik dan sosial serta melalui pendekatan ekonomi dalam kerangka analisis politik (Sema, 2008).

Menurut Ndikumana (2006), menyatakan korupsi kemungkinan besar dapat meningkatkan kemiskinan karena menurangi potensi penghasilan bagi orang miskin. Pemberantasan korupsi adalah masalah penting dalam mengurangi kemiskinan atau keiskinan yang biasanya ditunjukkan oleh pendapatan rendah, pendidikan dan kesehatan rendah dan kerentanannya dapat mengundang terjadinya korupsi.

Policardo (2018),
 Tingginyakorupsidapatmeningkatkan ketimpanganpendapatan dan juga
 kemiskinanbahkansebaliknyakebijakan yang
 dapatmengurangiterjadinyakorupsikemungkinanbesar juga
 dapatmengurangiterjadinyaketimpanganpendapatan dan kemiskinan.
 Ketimpanganpendapatandapatmempengaruhikorupsimelalui beberapasaluran yait
 upertama, dari ketimpangannormasosialmasyarakattentang korupsi dan lembaga
 yang membuatnya mudah untuk menoleransi korupsi sebagai perilaku yang
 dapat diterima. Kedua, orang kaya memiliki motivasi dan peluang yang
 lebih besar untuk terlibat korupsi, sedangkan orang miskin
 lebih rentan terhadap pemerasan sehingga tidak mampu memantau dan
 meminta pertanggungjawaban orang kaya.

Korupsi memiliki beberapa indikator yang mencakup diantaranya Indeks
 Perilaku Korupsi, Indeks Persepsi Korupsi, dan Indeks Pengalaman Korupsi.
 Untuk mengukur tingkat korupsi di suatu negara, Transparency International
 memiliki indikator yang dikenal Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yaitu indeks
 yang mengukur persepsi pelaku usaha terhadap praktik suap di suatu daerah.
 Survei International mengenai persepsi korupsi yang diprakarsai Transparency
 International (TI) menyatakan korupsi dilakukan dengan sangat rahasia karena
 ada kepentingan bersama di antara pelakunya. Ukuran yang disepakati untuk
 luas jaringan konspirasi korupsi salah satunya adalah dengan melakukan survei.
 Survei dapat menimbulkan kepercayaan pada apa yang sepintas nampak sebagai
 pernyataan oleh responden. Khusus tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang

dikeluarkan oleh Transparency International (TI) yang berguna untuk memberi gambaran tentang masalah korupsi di berbagai negara namun, mendapat kritik tajam karena hanya berfokus pada penerimaan dan pemberi suap, sementara pihak pemberi dan penerima suap di perusahaan internasional tidak dimasukkan. Indeks Persepsi Korupsi memberi pesan sederhana pada pemerintah yang menunjukkan kinerja rendah yang jelas survei Transparency International mencerminkan persepsi pada pengusaha tentang tingkat korupsi di berbagai negara.

a. TeoriPemburuan “Rente”

Konsep *rente* (*rent*) pertama kali dikembangkan oleh pakar ekonomi Klasik David Ricardo. Dalam kajian ekonomi politik “laba” yang diterima penguasa melalui kekuasaan yang digunakan untuk mengejar kepentingan pribadi juga disebut “rente”. Adapun perilaku aparat penguasa yang mengharap imbalan atas kebijakan yang dikeluarkan disebut perilaku “kalaprente”. Pada tahun 70-an di kebanyakan negara-negara berkembang, dijumpai gejala umum dimana semua orang berbicara “ demi bangsa”, tetapi yang sebenarnya diburu adalah untuk keuntungan pribadi atau kepentingan kelompok (Deliarnov, 2006). Orang yang paling rentan disogok ialah pejabat dimana ia bukannya melayani tetapi justru sebaliknya minta dilayani waktu menjalankan tugasnya, jika tidak diberi imbalan dalam bentuk hadiah atau lebih tepatnya disogoki akan memblokir keputusan yang efisien. Dampak dari praktik perburuan rente

pada tahun 1960-an dan 1970-an kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang di landas pemerintahan yang korup dan personalistik sehingga pembangunan tidak jalan. Untuk mengurangi praktik perburuan rente oleh para aparat dan birokrat sebagai pakar ekonomi menyarankan agar negara-negara sedang berkembang melakukan liberalisasi, swastanisasi dan desentralisasi (Deliarnov, 2006).

Menurut Nicholson (1999) Dalam literatur ekonomi masa sekarang yang dimaksud sewa atau rente adalah kelebihan pembayaran atas biaya minimum yang diperlukan untuk tetap mengkonsumsi faktor produksi. Dan segala bentuk keuntungan eksekif (super normal) yang berhubungan dengan struktur pasar yang mengarah ke monopoli dapat dikatakan rente. Untuk memperoleh keuntungan lebih tinggi, pengusaha berkolusi dengan penguasa agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan pengusaha. Sebagai imbalannya pengusaha memberikan imbalan atau lebih tepat sogokan baik melalui uang tunai maupun hadiah (Deliarnov, 2006).

b. Teori Ekonomi Politik Baru

Ilmu ekonomi dan ilmu politik dibagi atas dua disiplin yang berbeda yang mana ekonomi dan politik dapat diakomodasikan ke dalam sebuah prinsip pengambilan keputusan tunggal tentang perilaku manusia yang didasarkan pada rasionalitas individu. Apabila individu dapat menata pilihan dalam *setting* pasar maka mereka tentu juga dapat menatanya dalam *setting*

politik, karena kedua *setting* tersebut para pelaku dilandaskan atas kepentingan individu.

Kerangka analisis ekonomi politik baru didasarkan pada aktor individu yang memperjuangkan kepentingan pribadi, tepatnya individu diasumsikan sebagai “*goal seeking and choosing creatures*” yang beroperasi di lingkungan yang berbeda yang mana di asumsikan mempunyai sifat-sifat khusus yang spesifik, termasuk seperangkat selera dan kemampuan mengambil keputusan secara rasional atau kemampuan memilih alternatif yang paling efisien dari berbagai pilihan yang ada (Mitchell, 1968).

3. Kemiskinan

Kuncoro

(2006) menyatakan kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya berada pada garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup atau tidak mampu untuk mendapatkan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya mereka (Todaro dan Smith 2011).

Kemiskinan menggambarkan suatu ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi untuk standar kehidupan. Tingkat kemiskinan adalah persentase dari populasi yang pendapatannya berada di bawah tingkat mutlak yang disebut dengan garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah tingkat mutlak pendapatan yang ditentukan oleh pemerintah

federal untuk setiap keluarga di bawah tingkat di mana suatu keluarga dikatakan miskin (Mankiw, 2003).

Menurut *World Bank* (2000), menyatakan kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan.

Ini dari permasalahan kemiskinan yaitu batasan-

batas tentang kesejahteraan itu sendiri. Kemiskinan di hubungkan dengan tingkat kesejahteraan yang

dapat diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kesejahteraan dengan

kata lain

kurangnya akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

kekurangan akses yang dimaksud adalah kurangnya pendapatan seseorang.

Sedangkan menurut Ogbeide dan Agu (2015), menyatakan kemiskinan dan

ketimpangan pendapatan memiliki keterkaitan yang tak terpisahkan dimana,

distribusi pendapatan yang lebih baik dapat membantu orang-orang dari kelompok

yang

berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatannya sehingga dapat keluar dari

kemiskinan.

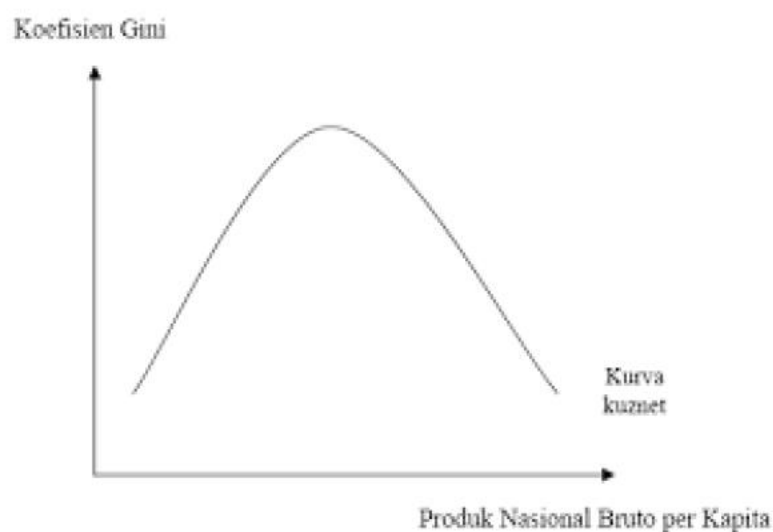
Menurut Kuznets dalam Kuncoro (2004), menyatakan ketimpangan pendapatan juga memiliki hubungan secara tidak langsung dengan kemiskinan.

Hubungan secara tidak langsung yaitu melalui pertumbuhan ekonomi. Pada saat

pertumbuhan ekonomi meningkat maka juga

dapat meningkatkan ketimpangan, mereka yang terkena dampak dari

peningkatanketimpangandapatdikatakan miskin
 sehinggadampaknegatifpertumbuhanterhadapketimpangan juga mengarah pada
 peningkatankemiskinan dan juga
 adanyahubunganpositifantaratingkatketimpangan dan kemiskinan yang
 mempengaruhi suatu negara.



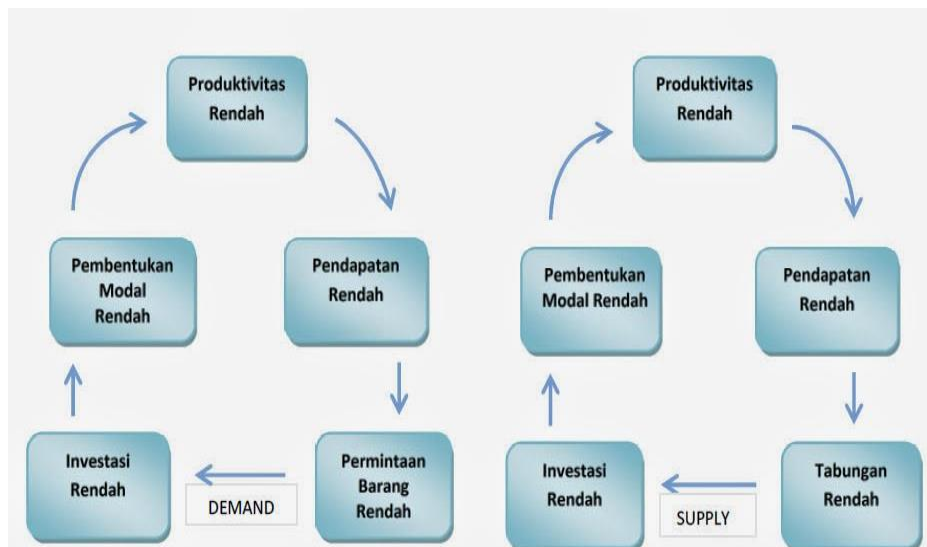
Gambar 2.3 Kurva Kuznet
Sumber : Todaro (2006)

Kuznets menjelaskan pertumbuhan ekonomi di negara miskin pada awalnya cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan. Namun bila negara miskin sudah semakin maju, maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan akan menurun.

Menurut Chetwynd et al (2003), menyatakan kemiskinan itu terkait dengan akses dan kualitas publik yang penting bagi masyarakat miskin, seperti : kesehatan, infrastruktur dan pendidikan yang layak. Pada tingkat makro,

korupsi mempengaruhi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang menurun, mengurangi investasi asing dan domestik, mendistorsi pasar dan ketidaksetaraan. Oleh karena itu korupsi lebih mungkin untuk meningkatkan kemiskinan karena berpotensi mengurangi pendapatan masyarakat miskin.

Lingkaran setan kemiskinan adalah deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat. Teori ini ditemukan oleh Ragnar Nurkse 1953 (Jhingan, 2016). Berikut gambar lingkaran setan kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) versi Nurkse :



Gambar 2.3 Lingkaran Setan Kemiskinan
Sumber : Ragnar Nurkse 1953 (Jhingan, 2016)

Lingkaran setan berasal dari fakta bahwa produktivitas total negara terbelakang yang sangat rendah sebagai akibat kurangnya modal, pasar tidak sempurna dan keterbelakangan ekonomi. Dapat dilihat dari sudut permintaan,

rendahnya tingkat pendapatan nyata dapat menyebabkan tingkat permintaan menjadi rendah, sehingga tingkat investasi pun juga ikut rendah. Investasi yang rendah kembali menyebabkan kurangnya modal dan produktivitas rendah. Dilihat dari sudut penawaran, produktivitas yang rendah tercermin di dalam pendapatan nyata yang rendah. Apabila pendapatan nyata rendah berarti tingkat tabungan juga rendah. Tingkat tabungan yang rendah menyebabkan tingkat investasi rendah dan modal kurang. Kekurangan modal bermuara kepada produktivitas yang rendah.

a. Ukuran Kemiskinan

Dalam pengukuran tingkat kemiskinan, Badan pusat statistik (2015) menggunakan metode dengan pendekatan kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Melalui pendekatan yang digunakan bahwa kemiskinan bisa dipandang dari ketidakmampuan dari segi ekonomi guna memenuhi kebutuhan dasar dalam bentuk makanan dan bukan makanan yang dihitung dari segi pengeluaran. Indikator yang dipergunakan dalam pendekatan tersebut yaitu Head Count Index (HCI) adalah jumlah atau persentase dari penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan.

Menurut Todaro dan Smith (2011:265) menjelaskan selain *head count index* atau besaran produk yang ada di bawah garis kemiskinan, ada pula indikator lainnya yang dipergunakan dalam mengukur kemiskinan yakni indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) serta indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*). Ukuran

tingkat kemiskinan dicetuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke atau disebut ukuran kelas kemiskinan P_α . Indeks P_α adalah sebagai berikut :

$$P_\alpha = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^H \left(\frac{Y_p - Y_i}{Y_p} \right)^\alpha$$

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Sulemana dan Daniel (2018) tentang *An empirical examination of the relationship between income inequality and corruption in Africa* menggunakan data panel tidak seimbang untuk 48 negara dari 1996-2016, menyatakan adanya hubungan timbal balik antara korupsi dan ketimpangan pendapatan dimana ketimpangan pendapatan sebagai variabel dependen dan korupsi sebagai variabel independen.

Policardo, dkk (2019) tentang *causality between income inequality and corruption in OECD countries* menggunakan data panel 34 negara OECD dari tahun 1995-2011, menyatakan hubungan sebab akibat antara korupsi dan ketimpangan pendapatan adalah spesifik Negara dan menemukan korupsi itu dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pendapatan mempengaruhi korupsi secara positif.

Policardo dan Carrera (2018) tentang *Corruption causes inequality, or is it the other way around? An empirical investigation for a panel of countries* menggunakan data panel 50 negara dari tahun 1995-2015,

menyatakan bahwa adanya arah kausalitas antar korupsi dan ketimpangan pendapatan bersifat spesifik negara dan bersifat dua arah. Dengan langkah estimasi GMM dinamis Arellano-Bond menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan bertanggung jawab untuk meningkatkan korupsi, sementara korupsi secara statistik tidak berdampak pada ketimpangan.

Ogbeide dan Agu (2015) tentang *poverty and income inequality in Nigeria : Any Causality?* menggunakan data panel dari tahun 1980-2010, menyatakan bahwa penelitian ini adanya hubungan secara langsung kausalitas dari kemiskinan dan ketimpangan pendapatan secara tidak langsung melalui pengangguran pada ketimpangan pendapatan yang dapat memperburuk kemiskinan di Nigeria.

Negin, dkk (2010) tentang *The Causal Relationship between Corruption and Poverty: A Panel Data Analysis* menggunakan data panel 97 negara dari tahun 1997-2006. Menyatakan adanya hubungan kausalitas dua arah antar korupsi dan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan dinamis sistem panel GMM estimator berfokus pada kemiskinan menggunakan indeks kemiskinan manusia (HPI).

Rahayu & Widodo (2012) tentang *The Causal Relationship Between Corruption and Poverty in ASEAN : A general method of moments/dynamic panel data analysis* menggunakan data panel 9 negara ASEAN tahun 2005-2009. Penelitian ini menggunakan metode umum / data panel dinamis (GMM), menyatakan bahwa kemiskinan tidak mempengaruhi korupsi tetapi korupsi lah yang

mempengaruhi kemiskinan.

Dan

terdapat kausalitas satu arah antara korupsi dengan kemiskinan.

Joko Waluyo (2010) tentang Analisis hubungan kausalitas antara korupsi, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan : suatu studi lintas negara menggunakan data panel lintas negara tahun 1995-2007. Menyatakan bahwa kemiskinan tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi, korupsi tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi berdampak pada korupsi, kemiskinan tidak berdampak pada korupsi, dan korupsi tidak berdampak pada kemiskinan.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan untuk menjelaskan, menerapkan dan menunjukkan persepsi hubungan antar variabel yang akan diteliti berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dengan berlandaskan pada kajian teori di atas. Penelitian yang berjudul “Analisis Kausalitas Ketimpangan Pendapatan, Korupsi dan Kemiskinan di negara Berpendapatan Menengah Bawah di ASEAN” menunjukan keterkaitan variabel yang diteliti adanya hubungan timbal balik variabel Ketimpangan Pendapatan (Y1), Korupsi (Y2) dan Kemiskinan (Y3).

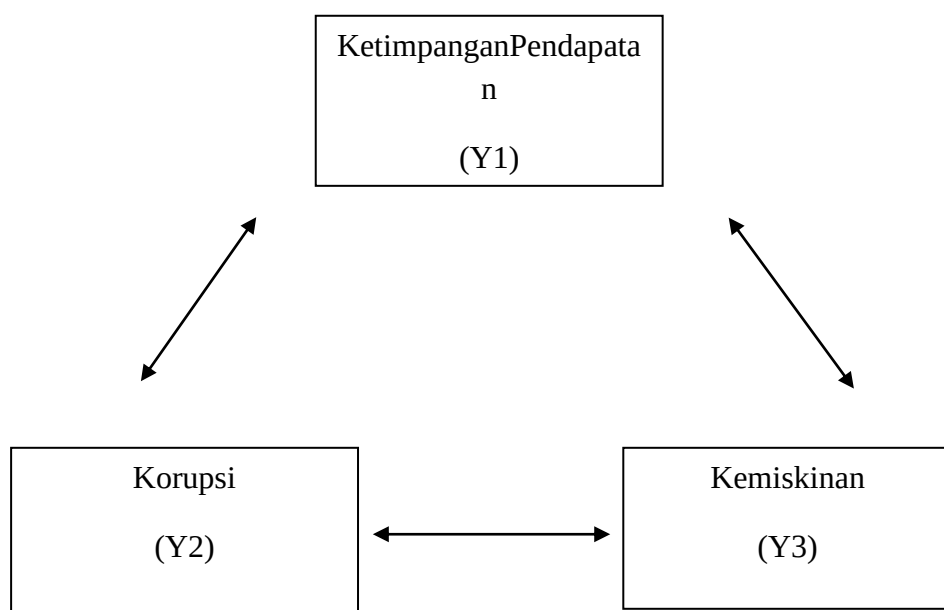
Pertama, kausalitas variabel ketimpangan pendapatan dengan korupsi di negara berpendapatan menengah bawah di ASEAN. Ketika ketimpangan pendapatan meningkat maka tingkat korupsi di negara berpendapatan menengah bawah di ASEAN juga ikut meningkat. Begitu pun sebaliknya, ketika korupsi meningkat maka ketimpangan pendapatan juga akan meningkat. Hal

ini disebabkan ketika ketimpangan pendapatan tinggi maka korupsi di suatu negara juga tinggi karena orang kaya memiliki peluang atau motivasi yang lebih besar untuk terlibat korupsi sedangkan orang miskin lebih rentan terhadap pemerasan sehingga tidak mampu memintapertanggungjawabannya orang kaya.

Kedua, kausalitas variabel ketimpangan pendapatan dengan kemiskinan di negara berpendapatan menengah kebawah di ASEAN. Ketika ketimpangan pendapatan meningkat maka secara langsung dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di negara berpendapatan menengah kebawah di ASEAN. Begitu pun sebaliknya, ketika kemiskinan di negara menengah rendah Asia Tenggara meningkat maka secara langsung mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di negara berpendapatan menengah kebawah di ASEAN. Hal tersebut dibuktikan dimana tingkat kemiskinan diukur dengan pendapatan perkapita di suatu negara. Ketika pendapatan perkapita di suatu negara menurun, maka akan mengakibatkan meningkatnya kemiskinan, sehingga terjadinya ketimpangan pendapatan di suatu negara antara penduduk yang berpendapatan rendah dengan penduduk yang berpendapatan tinggi.

Ketiga, kausalitas variabel korupsi dengan kemiskinan di negara berpendapatan menengah kebawah di ASEAN. Ketika tingkat korupsi meningkat maka tingkat kemiskinan di negara berpendapatan menengah kebawah di ASEAN juga meningkat. Begitu pun sebaliknya, ketika kemiskinan di negara berpendapatan menengah kebawah di ASEAN meningkat maka korupsi di negara berpendapatan menengah kebawah di

ASEAN juga akan meningkat. Hal ini disebabkan korupsi berpotensi dapat mengurangi pendapatan bagi orang miskin yang membuat orang miskin semakin miskin. Dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan, korupsi dan kemiskinan memiliki hubungan sebab akibat di negara berpendapatan menengah kebawah di ASEAN. Berdasarkan penjelasan di atas maka secara sistematis, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Kausalitas Ketimpangan Pendapatan, Korupsi dan Kemiskinan di Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEAN

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan kerangka konseptual di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

1. Didugaterdapathubungankausalitasantaraketimpanganpendapatandengankorupsi di Negara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Didugaterdapathubungankausalitasantaraketimpanganpendapatandengankeiskinan di Negara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Didugaterdapathubungankausalitasantarakorupsidengankemiskinan di Negara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan hasil penelitian yang di lakukan menggunakan metode VAR dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil dalam uji kausalitas granger menunjukan bahwa terdapatnya hubungan kausalitas antara ketimpangan pendapatan dan korupsi. Besarnya ketimpangan pendapatan akan mempengaruhi besarnya korupsi di negara berpendapatan menengahkebawah di ASEAN.
2. Hasil dalam uji kausalitas granger menunjukan bahwa terdapatnya hubungan satu arah antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Besarnya ketimpangan pendapatan akan mempengaruhi besarnya kemiskinan di negara berpendapatan menengahkebawah di ASEAN. Namun, besarnya kemiskinan tidak akan mempengaruhi besarnya ketimpangan pendapatan.
3. Hasil dalam uji kausalitas granger menunjukan antara korupsi dengan kemiskinan tidak memiliki hubungan kausalitas atau tidak mempengaruhi satu sama lain. Besarnya korupsi tidak mempengaruhi besarnya kemiskinan di negara berpendapatan menengahkebawah di ASEAN.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai kausalitas ketimpangana pendapatan, korupsi dan kemiskinan diNegara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN. Maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di kawasan Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEANmaka perlunya peran dan kebijakan dari masing-masing Negara Berpendapatan Menengah Kebawah di ASEANdalam menyikapi kondisi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dengan caralebih meningkatkan sembilan sektor perekonomian diNegara Berpendapatan MenengahKebawah di ASEAN.
2. Upaya memperbaiki kinerja birokrasi perlu ditingkatkan guna mengurangi secara nyata tindak korupsi di birokrasi yang mampu mempengaruhi biaya tambahan dan melaksanakan nilai-nilai *good governance* dalam penyelenggaraan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah.
3. Penulis menyadari penelitian ini masih terdapat kekurangan yang memerlukan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya, oleh karena itu penulis mengharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan metode kualitatif guna melihat pengaruh korupsi secara mikro dan terfokus pada suatu daerah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefianto, M. (2012). *Ekonometrika dan Esensi dan Aplikasi Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik: Mencakup Berbagai Teori dan dan Konsep yang Komprehensif*. Jakarta: Erlangga.
- Ekananda, M. (2016). *Analisis Ekonometrika Time Series*. Jakarta: Erlangga.
- Jhingan, M. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw, N. Gregory. (2003). *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Kaitan Korupsi dengan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi*. (2016). Belajar Ekonomi.
- Klitgard, R. (2001). *Controlling Corruption: (Terjemahan Hermayo: Membasmi Korupsi)*. Yayasan Obor Indonesia.
- Policardo, L., & Careera Sanchez, E. J. (2018). Corruption causes inequality, or is it way around other? An empirical investigation for the state panel. *Analisis dan Kebijakan Ekonomi*.
- Policardo, L., & J, E. (2019). Causality between income inequality and corruption in OECD countries. *World Development Perspektif*.
- Purnamasari, D. (2017). *Ketimpangan Kekayaan di ASEAN, Indonesia Nomor Dua*. Jakarta: Tirto.id.